

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI WISATA SUNGAI TAMBORASI DI DESA TAMBORASI KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MUHAMMAD ASYRAF

30.1357

asdaf Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Kebijakan Publik

Email : asyrafanhar5@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Sarwani, M.Ag

ABSTRACT (in english)

Problems/Background (GAP): This tourist object is named the Tamborasi bath by the local community because it is considered to have its own uniqueness, namely the designation of the shortest river in the world. With this uniqueness, local and non-local people often make visits to this area both for recreation and for research purposes.

Purpose : This study aims to determine the implementation of policies for developing the tourism potential of the Tamborasi River, knowing the supporting and inhibiting factors in the implementation of tourism potential development policies. Tamborasi River, as well as to find out the efforts made to overcome obstacles in the implementation of policies for developing the tourism potential of the Tamborasi River in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province. **Methods:** The sampling technique in this study used purposive sampling. This type of research is qualitative with data collection using the interview method. **Results/Findings:** the findings obtained by the authors in this study are that there are several supporting factors in the implementation of the Tamborasi River development policy, namely the synergy between the government and the local community, facilities and infrastructure have been completed by the government and will be cared for by the Tamborasi River manager. However, there are inhibiting factors, namely the distance to the Tamborasi river which is relatively far away, visitors who damage the Tamborasi river facilities are still found, there are no souvenirs typical of the Tanborasi river that can be traded. Several efforts have been made, namely building tourist attractions, building tourist accessibility, completing advice and infrastructure on the Tamborasi River, and empowering local communities to increase awareness, capacity, access, and the role of the community, both individually and in groups, in advancing quality of life , independence, and prosperity through tourism activities. **Conclusion:** The implementation of the Tamborasi River Tourism Potential Development Policy in Tamborasi Village, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province has been carried out well but still needs some improvement in the dimensions of communication, bureaucratic structure, and disposition according to Edward III's theory

Keywords: Policy Implementation, Tamborasi River, Tourism Potential

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang(GAP) :Obyek wisata ini diberi nama permandianTamborasi oleh masyarakat setempat karena dinilai memiliki keunikan tersendiri yakni dengan adanya sebutan sungai terpendek di dunia. Dengan keunikan tersebut, maka masyarakat lokal maupun non lokal sering mengadakan kunjungan ke daerah ini baik bersifat rekreatif maupun untuk tujuan penelitian.**Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan potensi Wisata Sungai Tamborasi, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan potensi Wisata Sungai Tamborasi, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan potensi Wisata Sungai Tamborasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. **Metode** : Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara. **Hasil/Temuan** : temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini ialah terdapat beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengembangan sungai tamborasi yaitu adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat setempat, fasilitas sarana dan prasarana telah dilengkapi oleh pemerintah dan akan dirawat oleh pengelola sungai tamborasi. Namun terdapat faktor penghambat yaitu jarak sungai tamborasi yang tergolong jauh, masih ditemukan pengunjung yg merusak fasilitas sungai tamborasi, belum terdapat cinderamata khas sungai tamborasi yang dapat diperjual belikan. Beberapa upaya telah dilakukan yaitu membangun daya tarik wisata, membangun aksesibilitas wisata, melengkapi sarana dan prasarana di sungai tamborasi, serta dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat guna untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata. **Kesimpulan** : Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Wisata Sungai Tamborasi Di Desa Tamborasi Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu beberapa peningkatan pada dimensi komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi sesuai dengan teori Edward III

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Sungai Tamborasi, Potensi Wisata

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang besar sebagai faktor untuk memajukan perekonomian nasional. Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan dan prioritas pengembangan bagi sejumlah Negara, terlebih bagi Negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan adanya daya tarik wisata cukup besar, banyaknya keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya dan kehidupan masyarakat.

Kabupaten Kolaka adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara dan terletak di pulau Sulawesi. Salah satu faktor pendukung dalam pertumbuhan Kabupaten Kolaka adalah pariwisata. Kabupaten Kolaka memiliki banyak tempat wisata untuk keperluan liburan bagi wisatawan yang berasal dari dalam kota maupun luar kota. Kawasan wisata alam salah satunya adalah Sungai Tamborasi. Obyek wisata ini diberi nama permandian Tamborasi oleh masyarakat setempat karena dinilai memiliki keunikan tersendiri yakni dengan adanya sebutan sungai terpendek di dunia (Dinas Pariwisata, 2005). Air sungai ini kelihatan berwarna hijau dan sangat jernih serta dasarnya yang terus berubah-ubah. Dengan keunikan tersebut, maka masyarakat lokal maupun non lokal sering mengadakan kunjungan ke daerah ini baik bersifat rekreatif maupun untuk tujuan penelitian

Jumlah Pengunjung Objek Wisata Sungai Tamborasi bisa dikatakan stabil, tidak ada penurunan pengunjung yang begitu signifikan. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung 5.400 Orang, tahun 2018 jumlah pengunjung 5.650 Orang, tahun 2019 jumlah pengunjung 5.150 Orang, tahun 2020 jumlah kunjungan 4.138 Orang dan tahun 2021 jumlah kunjungan 4.940 Orang.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai basis regulasi pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wisata sungai tamborasi di desa tamborasi dan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada 4 (tiga) permasalahan utama dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Potensi Wisata Sungai Tamborasi Di Desa Tamborasi Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni 1) fasilitas umum seperti tempat sampah, WC dan kamar mandi umum kurang memadai. 2) sampah dan limbah anorganik berserakan di mana-mana. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan kawasan wisata ini kurang efektif disebabkan. 3) kurangnya partisipasi masyarakat setempat maupun perhatian pemerintah. 4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan wisata alam Tamborasi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengembangan dan pariwisata. Penelitian pertama dilakukan oleh Widyaningsih, Usman, dan Syukri (2021) dengan judul "Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar sebagai motivator di Pantai

Tanjung Bayang optimal dari beberapa hasil wawancara lapangan yang didapatkan, namun sebagai fasilitator Pemerintah Dinas pariwisata belum cukup baik dalam pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Bayang karena tidak memberikan sumbangsih seperti yang diharapkan pengelola Pantai Tanjung Bayang hanya menjanjikan tetapi tidak dilaksanakan dengan baik

Penelitian sebelumnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Bima (2017). Penelitian ini berjudul “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Daerah Wisata Pantai Bandengan di Kabupaten Jepara”. Hasil penelitian (1) Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan terdiri dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan produk wisata, pengembangan pasar dan pemasaran dan pengembangan kelembagaan; (2) Dampak sosial ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Dampak sosial meliputi pola pikir masyarakat, perilaku masyarakat dan kepercayaan diri masyarakat. Dampak perubahan ekonomi yang dialami adalah meningkatnya pendapatan masyarakat; (3) Kendala yang dialami oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal ini berupa terbatasnya anggaran dan masih minimnya tenaga ahli sedangkan kendala eksternal dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Maddimuri (2015). Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dikatakan belum efektif, dengan alasan karena peran pemerintah sebagai regulator belum mampu melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam, karena pengelolaan pengembangan potensi wisata belum terkelola sesuai dengan perundangan.

Penelitian sebelumnya yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Musfira (2021). Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Objek Dermaga Tua Sapoiha Di Desa Sapoiha Kabupaten Kolaka Utara”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) peran pemerintah terkait pengembangan objek Dermaga Tua Sapoiha yaitu pemerintah desa membangun fasilitas seperti jembatan titian, gazebo, masjid terapung sarana guna menunjang kegiatan para wisatawan, serta dengan membuat stand atau kedai untuk dijadikan tempat berdagang guna meningkatkan pendapatan masyarakat. 2) kendala dalam mengembangkan objek Dermaga Tua Sapoiha ialah lokasi yang ditempati masih milik menrti perhubungan dan juga memiliki keterbatasan dana.

Penelitian sebelumnya yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Sarawati Ero Lewar (2020). Penelitian ini berjudul “Strategi Pengembangan Wisata Pantai Pasir Putih Lasusua Kolaka Utara Sebagai Wisata Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI”. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kawasan wisata Pantai Pasir Putih terbilang masih baru dan Dinas Pariwisata Kolaka Utara akan bekerja sama dengan

pemerintah desa untuk terus di kembangkan wisata Pantai Pasir Putih Lasusua. Untuk strategi pengembangan wisata Pantai Pasir Putih menjadi pariwisata syariah sudah adra ancangan ke sana sesuai dengan visi misi Kolaka Utara adalah menjadikan kota Kolaka menjadi kota Madani. Untuk respon pengunjung terkait strategi pengembangan pariwisata syariah di wisata Pantai Pasir Putih, sekitar 99% pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Lasusua mengatakan setuju karena melihat mayoritas masyarakat Kolaka Utara beragama muslim.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan pengembangan potensi wisata sungai tamborasi di desa tamborasi kabupaten kolaka provinsi sulawesi tenggara, locus daerah penelitian juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan Maddimuri, Musfira, Sarawati Ero Lewar, maupun Widyaningsih dkk. Selain itu metode yang digunakan juga berbeda dengan metode penelitian sebelumnya, yakni menggunakan *Analysis Hierarchy Process (AHP)* untuk menentukan prioritas pengembangan daerah wisata yang digunakan dengan aplikasi *expert choice*.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana implementasi, faktor pendukung dan penghambat, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kebijakan pengembangan potensi Wisata Sungai Tamborasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti berasumsi bahwa peneliti akan menemukan sumber informasi yang sebenarnya terjadi secara luas dan mendalam, sehingga penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal dari penelitian dan memberikan gambaran secara sistematis melalui analisis induktif, yang memungkinkan pengamatan peneliti muncul dari keadaan umum dan keadaan awal penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, *Snowball sampling*, *Sequential* (W. Lawrence Neuman, 2007)

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara semi terstruktur terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata Kab Kolaka dan Kepala Desa Tamborasi masing masing 1 orang, Perwakilan Kelompok Masyarakat, Pengelola Objek Wisata Tamborasi, Pengunjung Objek Wisata Sungai Tamborasi yang dimana masing masing 5 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi yang digagas oleh Edward III, yang menyatakan bahwa implementasi terdiri dari 4 dimensi yakni komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan

sumber daya. Dan untuk menganalisis data menggunakan Teknik analisis ASOCA dengan pendekatan kualitatif, yang terdiri dari Ability, Strength, Opportunities, Culture, dan Agility.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengembangan potensi wisata sungai tamborasi di desa tamborasi kabupaten kolaka provinsi sulawesi tenggara menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa implementasi terdiri dari empat dimensi, yakni komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Implementasi kebijakan pengembangan potensi Wisata Sungai Tamborasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan hasil wawancara dan kunjungan peneliti ke Dinas Pariwisata Kab. Kolaka, terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kab. Kolaka dalam mengembangkan potensi pariwisata Kab. Kolaka khususnya objek wisata Sungai Tamborasi antara lain :

A. Komunikasi

Sesuai hasil penelitian, dapat dikatakan dalam komunikasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka masih terdapat beberapa kendala. Secara teknis kendala yang terjadi yaitu keterbatasan waktu, anggaran dan jumlah karyawan yang kurang memadai. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka masih banyak menggunakan cara yang konvensional seperti sosialisasi langsung kepada para pelaku implementasi kebijakan. Sosialisasi langsung kepada para pelaku implementasi kebijakan. Cara konvensional ini memiliki beberapa kelemahan antara lain membutuhkan waktu, tenaga dan anggaran yang lebih banyak. Alasan mengapa dinas pariwisata masih menggunakan cara konvensional dikarenakan masih ada pelaku implementasi kebijakan yang belum mengikuti perkembangan teknologi. Selain kendala fisik, ada pula kendala non-fisik yang dihadapi oleh dinas pariwisata. Menurut hasil penelitian, selain terkendala dengan fisik dinas pariwisata juga terkendala dengan cara penyampaian komunikasi itu sendiri. Cara penyampaian komunikasi yang tidak dapat diterima dengan sempurna akan menimbulkan konflik.

B. Sumber Daya

Sumber daya yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya juga faktor penting dalam mengimplementasikan

kebijakan pengembangan destinasi wisata Sungai Tamborasi. Meskipun ada kebijakan yang bagus, akan tetapi jika tidak memiliki sumber daya yang memadai maka kebijakan tidak bisa diimplementasikan secara optimal. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, Sungai Tamborasi memang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam bidang kepariwisataan. Tidak sedikit masyarakat di sekitar Sungai Tamborasi memanfaatkan kegiatan kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain sumber daya alam, ada juga sumber daya manusia yang memiliki andil dalam implementasi kebijakan.

Kurangnya jumlah staf yang ada di dinas pariwisata menjadi kendala dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Faktor sumber daya memiliki peran penting dalam setiap program yang dijalankan untuk mengimplementasikan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh seberapa kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang menunjang lainnya.

Kaitan antara sumber-sumber dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, bahwa dengan ketercukupan sumber-sumber daya akan mengundang keterlibatan individu-individu atau kelompok kepentingan lain dalam masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengimplementasian kebijakan. Akan tetapi, apabila sumber-sumber daya yang tersedia sangat terbatas, tidak jarang akan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Dengan kata lain dinyatakan bahwa prospek manfaat dari implementasi kebijakan akan mengundang partisipasi optimal berbagai pihak dalam masyarakat, sebaliknya jika tidak menguntungkan akan mendatangkan penolakan dari berbagai pihak dalam masyarakat.

C. Disposisi

Sikap dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan oleh para pembuat keputusan. Para pelaksana sangat memahami bahwa pemahaman mereka secara umum maupaun rinci tentang ukuran-ukuran dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan adalah penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu ketidaktaatan mereka terhadap kebijakan akan berdampak pada kegagalan implementasi dari kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, dinas pariwisata selaku komponen penggerak dalam implementasi kebijakan memiliki sikap yang bersemangat dan juga mendorong akan tercapainya program kerja yang menunjang implementasi kebijakan. Semangat dari dinas pariwisata ini pun didukung oleh masyarakat setempat objek wisata Sungai Tamborasi dengan antusias. Dukungan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar karena menurut mereka, dengan adanya objek wisata di wilayah mereka dapat mendatangkan keuntungan-keuntungan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat seperti dengan adanya kios-kios makanan dan minuman serta cinderamata yang ditawarkan kepada pengunjung.

D. Struktur Birokrasi

Menurut hasil wawancara dan observasi peneliti, Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka tidak memiliki SOP yang khusus dalam program-program penunjang implementasi kebijakan. SOP merupakan salah satu program atau jenis kebijakan yang diimplementasikan untuk menyelesaikan suatu kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. SOP mempunyai dua makna, yaitu suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok dalam mencapai tujuan organisasi serta SOP merupakan tata cara atau tahapan yang diberlakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Dengan SOP pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk menjalankan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam penerapan peraturan sesuai program dan kontrol.

SOP yang tidak jelas, baik itu menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara para pelaku serta tidak harmonisnya hubungan di antara organisasi pelaksana maka akan dapat menimbulkan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Jika SOP jelas, maka akan semakin mudah dalam menentukan kebutuhan sumber daya. Selain itu, semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan, maka semakin memudahkan para pelaku implementasi kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik itu menyangkut tujuan, arah, kelompok sasaran, dan hasil apa yang dicapai maupun dinikmati baik oleh para pelaku kebijakan maupun organisasi pelaku kebijakan. Keadaan ini akan memudahkan seseorang dalam menentukan sikap dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Sedangkan selain SOP, struktur birokrasi juga merupakan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Mengingat Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka merupakan hanya salah satu dinas yang juga dibantu dan saling bekerja sama dengan dinas lain, maka diperlukan koordinasi. Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi karena akan membatasi kemampuan para pejabat tinggi untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dan akibat lebih lanjut dapat menimbulkan terjadinya ketidakefisienan serta pemborosan sumber daya yang ada. Fragmentasi dapat meningkatkan kegagalan komunikasi, dimana instruksi yang dijalankan oleh para pelaksana implementasi kebijakan akan terdistorsi. Fragmentasi dapat membatasi kemampuan para pelaku implementasi kebijakan untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan. Organisasi pelaksana implementasi kebijakan yang terfragmentasi dapat menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Organisasi pelaksana yang semakin terfragmentasi akan semakin membutuhkan koordinasi yang intensif, sehingga menimbulkan peluang terjadinya distorsi komunikasi yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

3.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan potensi Wisata Sungai Tamborasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis peneliti, ditemukan Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan potensi Wisata Sungai Tamborasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 1) Terbentuknya sinergi antara dinas pariwisata dengan masyarakat desa tamborasi untuk terus meningkatkan potensi objek wisata Sungai Tamborasi. 2) Fasilitas sarana dan prasarana yang telah dilengkapi dan terus dipelihara oleh pelaksana objek wisata Sungai Tamborasi. 3) Proses pengimplementasian kebijakan dan regulasi yang cepat. Sehingga, setiap kendala dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Sedangkan untuk Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan potensi Wisata Sungai Tamborasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 1) Jarak antara objek wisata Sungai Tamborasi dan pusat kota Kabupaten Kolaka yang terbilang cukup jauh. 2) Masih kerab ditemukan pengunjung yang merusak atau menciderai fasilitas-fasilitas yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara objek wisata Sungai Tamborasi. 3) Daya tarik objek wisata Sungai Tamborasi yang masih bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi. 4) Kurangnya cinderamata yang bisa diperjual-belikan di objek wisata Sungai Tamborasi.

3.3 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan potensi Wisata Sungai Tamborasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah 1) membangun daya tarik wisata, 2) pembangunan aksesibilitas wisata, 3) pembangunan prasarana umum, 4) fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, 5) pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat permasalahan yang berkaitan antara sumber-sumber dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, bahwa dengan ketercukupan sumber-sumber daya akan mengundang keterlibatan individu-individu atau kelompok kepentingan lain dalam masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengimplementasian kebijakan. Akan tetapi, apabila sumber-sumber daya yang tersedia sangat terbatas, tidak jarang akan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Dengan kata lain dinyatakan bahwa prospek manfaat dari implementasi kebijakan akan mengundang partisipasi optimal berbagai pihak dalam masyarakat, sebaliknya jika tidak menguntungkan akan mendatangkan penolakan dari berbagai pihak dalam masyarakat.

Dukungan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar karena menurut mereka, dengan adanya objek wisata di wilayah mereka dapat mendatangkan keuntungan-keuntungan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat seperti dengan adanya kios-kios makanan dan minuman serta cinderamata yang ditawarkan kepada pengunjung

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Implementasi kebijakan pengembangan potensi Wisata Sungai Tamborasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Wisata Sungai Tamborasi Di Desa Tamborasi Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu beberapa peningkatan pada dimensi komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah yaitu diantaranya : a) membentuk sinergitas antara setiap pemangku kebijakan untuk terus meningkatkan potensi objek wisata Sungai Tamborasi, b) meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas-fasilitas penunjang objek wisata Sungai Tamborasi, serta c) mempersingkat proses birokrasi dalam rangka mengefektifkan proses pengimplementasian kebijakan.
3. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi faktor penghambat antara lain : a) membangun daya tarik wisata, b) membangun aksesibilitas wisata, c) membangun prasarana umum.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan potensi wisata sungai tamborasi di desa tamborasi kabupaten kolaka untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama Dinas Pariwisata Kab. Kolaka beserta jajarannya dan Desa Tamborasi yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adji Adisasmitha, S. (2011). *Jaringan Transportasi (Teori dan Aplikasi)*. Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Butler.,Wijayanti, A. (2019). *Strategi Pengembangan Pariwisata Edukasi Di Yogyakarta*. Cv budi utama.
- Gamal, S. (2004). *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- George III Edward :implemeting public policy, 1980
- Karyono, A Hari. 1997. *Kepariwisataan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mulyono, S. (2008). *Manajemen Kota dan Wilayah : Realita & Tantangan*. Bumi Aksara.
- Ndraha,Taliziduhu, 2003, *Kybermology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pendit, Nyoman (1999). *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Akademi Pariwisata Trisakti
- Pitana, I Gede dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rusdi, F. (2017). *Analisis Media Online Dalam Pemberitaan Pariwisata: Studi Kebijakan Redaksi Detik Travel Dan Tribunnews Travel*. *Ejournal Umsida*. <https://core.ac.uk/download/pdf/229669122.pdf>
- Salam, Dharma Setyawan, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto. 2009 . *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yoyakarta: Gava Media
- Tjokroamidjojo, B. 1988. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: PT Perca

Skripsi/Jurnal Ilmiah

- Bima. 2017. Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Daerah Wisata Pantai Bandengan Di Kabupaten Jepara. Semarang : *Skripsi*. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang
- Fandeli, C. (2003). Pengembangan Kawasan Pedesaan Sebagai Objek Wisata (Perencanaan Modal Kelembagaan, Pasar dan Paket Wisata Pedesaan Sekitar Gunung Merapi). Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gajahmada.
- Ilyas, Muhammad. 2009. Strategi Pengembangan Pariwisata Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-Una. Tesis. Makassar: Program Studi Perencanaan, Pengembangan Wilayah. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Maddimunri, H. 2015. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung Di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros. Makassar : *Skripsi*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar
- Widyaningsih. 2021. Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar. Makassar : *Skripsi*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024
- Peraturan Bupati Kolaka Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka